



SOSIOLOGI PEMBANGUNAN



Amir Mahmud, S.Sos., S.H., M.Si.

Yuliana, S.Sos., M.Si.

Susi Lawati, S.E., M.Si.

Maryanto Tri Saputra, S.Kom., M.Si.

Harry Sepga Nanda, S.E., M.Si.

Dhiary Yessi Andarastuti, S.P., M.Si.



SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

**Amir Mahmud, S.Sos., S.H., M.Si.
Yuliana, S.Sos., M.Si.
Susi Lawati, S.E., M.Si.
Maryanto Tri Saputra, S.Kom., M.Si.
Harry Sepga Nanda, S.E., M.Si.
Dhiary Yessi Andarastuti, S.P., M.Si.**

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Penulis:

Amir Mahmud, S.Sos., S.H., M.Si.

Yuliana, S.Sos., M.Si.

Susi Lawati, S.E., M.Si.

Maryanto Tri Saputra, S.Kom., M.Si.

Harry Sepga Nanda, S.E., M.Si.

Dhiary Yessi Andarastuti, S.P., M.Si.

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Maryanto Tri Saputra, S.Kom., M.Si.

ISBN:

978-634-246-672-8

Cetakan Pertama:

Februari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku *Sosiologi Pembangunan* ini. Buku ini disusun sebagai bahan ajar dan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, serta pembaca umum yang berminat mempelajari dinamika pembangunan dari perspektif sosiologi.

Sosiologi pembangunan merupakan cabang ilmu sosiologi yang mengkaji proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam konteks pembangunan masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Pemahaman terhadap konsep, teori, serta pendekatan dalam sosiologi pembangunan menjadi penting guna menganalisis berbagai permasalahan pembangunan secara kritis, komprehensif, dan kontekstual.

Buku ini memuat pembahasan mengenai pengertian dan ruang lingkup sosiologi pembangunan, teori-teori utama seperti teori modernisasi, teori dependensi, dan teori sistem dunia, serta berbagai isu strategis pembangunan, antara lain globalisasi, demokratisasi, birokrasi, masyarakat sipil, sektor informal, eksklusi sosial, dan model-model pembangunan. Penyajian materi disusun secara sistematis untuk mendukung proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi lintas disiplin ilmu sosial.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan relevansi buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam kegiatan akademik dan kajian pembangunan.

Akhir kata, penulis berharap buku *Sosiologi Pembangunan* ini dapat digunakan secara luas dan memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika serta pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN	1
A. Sosiologi Pembangunan	1
BAB 2 TEORI MODERNISASI.....	3
A. Pendahuluan.....	3
B. Makna Teori Modernisasi.....	4
C. Lahirnya Teori Modernisasi	8
D. Asumsi Teori Modernisasi	12
BAB 3 TEORI DEPENDENSI	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Sejarah	26
C. Asumsi Teori Dependensi	34
D. Negara Dunia Ketiga	36
E. Kritik Teori Dependensi	38
BAB 4 TEORI SISTEM DUNIA	41
A. Pendahuluan.....	41
B. Sejarah	42
C. Dari Dependensi Menuju Sistem Dunia.....	47
D. Karakteristik Teori Sistem Dunia	51
BAB 5 DUALISME EKONOMI, MASYARAKAT PLURALIS	53
A. Dualisme Ekonomi	53
B. Jenis-Jenis Dualisme	56
C. Pengaruh Dualisme dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia	59
D. Pluralisme	60
E. Macam-Macam Pluralisme	61
BAB 6 GLOBALISASI DAN STRATEGI INDUSTRIALISASI	63
A. Globalisasi.....	63
B. Industri.....	64

BAB 7 DEMOKRATISASI DAN PERUBAHAN EKONOMI	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Landasan Sistem Ekonomi Indonesia	70
C. Deskripsi Pemikiran Mohammad Hatta	78
D. Tujuan Sistem Ekonomi	80
E. Struktur Perekonomian Indonesia	82
F. Evolusi Ekonomi Indonesia	85
BAB 8 BIROKRASI, SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI	89
A. Birokrasi.....	89
B. Mengembangkan Budaya Kepemimpinan Profesional Birokrasi	94
C. Dimensi Kinerja Birokrasi.....	95
D. Beberapa Indikator yang Digunakan untuk Mengukur Kinerja Birokrasi Publik	98
E. Pelayanan Publik	101
F. Strategi Penerapan Standar Pelayanan	104
G. Sentralisasi.....	106
H. Istilah dan Pengertian Desentralisasi	107
I. Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi.....	109
J. Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi	110
K. Hakikat Sentralisasi dan Desentralisasi	113
BAB 9 MASYARAKAT SIPIL	117
A. Masyarakat Sipil	117
B. Pengertian Demokrasi	118
C. Antara Masyarakat Sipil dan Demokrasi	119
D. Membangun Pemerintah Demokratis Melalui Peran Masyarakat Sipil	120
BAB 10 SEKTOR INFORMASI DAN USAHA MIKRO	129
A. Sektor Informal.....	129
B. Ciri-Ciri Sektor Informal	130
C. Peran Sektor Informal	131
D. Penyebab Timbulnya Sektor Informal	132
E. Usaha Mikro	133
F. Permasalahan yang Dihadapi UKM	135

BAB 11 EKSKLUSI SOSIAL.....	137
A. Eksklusi Sosial	137
B. Pembangunan Sosial dan Konsep Kesejahteraan Sosial.....	138
C. Pembangunan di Indonesia	139
D. Kohesi Sosial dan Kaitannya dengan Pembangunan	140
BAB 12 MODEL PEMBANGUNAN	145
A. Pendahuluan.....	145
B. Alternatif Model Pembangunan Ekonomi Indonesia	150
PROFIL PENULIS	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 11.1 Kohesi Sosial dan Pengembangan Masyarakat	142
Gambar 12.1 Upaya Advokasi Kebijakan Melalui “Agen Pembangunan” ..	152

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN

A. SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Soerjono Soekanto (2004:412-413) menjelaskan bahwa ilmu atau pengetahuan sosiologi sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pencarian, penerapan, dan penilaian proses pembangunan. Ilmu sosiologi dapat digunakan sebagai identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui unsur-unsur yang dapat melancarkan pembangunan dan yang dapat menghambat pembangunan.

Sosiologi pembangunan berkembang pesat sejak awal tahun 1960-an yang merupakan bagian dari ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi pembangunan dipengaruhi oleh pokok-pokok pikiran ahli sosiologi klasik seperti Marx, Weber dan Durkheim. Perkembangan sosiologi pembangunan semakin pesat seiring dengan adanya kegagalan program pembangunan yang disponsori oleh Amerika Serikat pada negara-negara dunia ketiga. Sebagai akibatnya hal tersebut memicu sebuah tanda tanya peneliti sosial untuk mengungkap faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut.

Sosiologi pembangunan membawa dampak pada lahirnya dimensi-dimensi baru dalam konsep pembangunan. Menurut Webster (1984), terdapat 5 dimensi yang perlu diungkap antara lain:

1. Posisi negara miskin dalam hubungan sosial dan ekonominya dengan negara-negara lain.

BAB 2

TEORI MODERNISASI

A. PENDAHULUAN

Teori modernisasi diramu oleh kalangan ilmuwan sosial pada pertengahan abad 20 untuk melihat bagaimana negara-negara barat terutama Amerika Utara dan Eropa Barat bisa berkembang sedemikian rupa. Negara-negara barat yang diteliti dianggap berhasil menjadi modern setelah melalui tahapan-tahapan yang teridentifikasi, meskipun perkembangannya kini semakin kompleks. Perkembangan tersebut diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi, termasuk perubahan politik ke arah demokrasi dan demokratisasi.

Teori modernisasi pada dasarnya melihat serangkaian proses yang terjadi sebagai prasyarat untuk bergerak dari kondisi yang tradisional menuju modern. Proses tersebut meliputi industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi, birokrasi, konsumsi, dan demokrasi. Secara praktis, proses tersebut dapat terlihat dari pembangunan infrastruktur di hampir segala bidang, sistem transportasi dan komunikasi yang mendorong masyarakat untuk semakin *mobile*, dan dibangunnya institusi sosial seperti sekolah formal dan media massa yang merupakan komponen penting penguat sistem demokrasi. Dalam aspek demografi, angka populasi secara di beberapa negara menurun atau meningkat namun tidak signifikan.

Teori modernisasi menciptakan sistem ekonomi yang mekanismenya didasarkan pada kebutuhan pasar. Kapitalisme otomatis didorong menjadi pusatnya. Rasionalisasi sebagai bagian dari komponen modernisasi mendorong birokratisasi. Pembagian kerja harus dilakukan melalui proses birokratisasi. Teori modernisasi juga melihat semua struktur dan sistem

BAB 3

TEORI DEPENDENSI

A. PENDAHULUAN

Teori ketergantungan adalah salah satu teori pembangunan yang dikembangkan pada akhir tahun 1950an dibawah bimbingan Direktur Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, Raul Presbisch yang menekankan pada konsep ekonomi yang mengidentifikasi ketergantungan finansial antara negara maju dan negara Dunia Ketiga. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori pembangunan sebelumnya yaitu teori modernisasi yang sangat mendominasi sejak akhir tahun 1940an. Selain itu, dunia dihadapkan pada adanya kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di Negara-negara industri maju ternyata tidak serta merta mengarah pada pertumbuhan di Negara-negara miskin.

Menurut teori ketergantungan, pembangunan di Negara-negara berkembang dan Negara sedang berkembang Dunia Ketiga sebagai sesuatu yang sama. Dasar kesejahteraan Negara-negara yang berada di pusat kehidupan internasional ialah akibat dari eksploitasi terhadap Negara-negara lain yang ada di periferinya. Kaum elit setempat dan perusahaan multinasional mempertahankan pengaturan sosial dan struktural yang menimbulkan ketergantungan itu. Teori ketergantungan pada intinya berusaha untuk menjelaskan keadaan terbelakang banyak negara di dunia dengan memeriksa pola interaksi antar bangsa dan dengan alasan bahwa ketidaksetaraan antar bangsa merupakan bagian intrinsik dari interaksi tersebut.

BAB 4

TEORI SISTEM DUNIA

A. PENDAHULUAN

Teori sistem dunia merupakan sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, pertukaran barang dan bahan mentah. Pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi dunia secara keseluruhan. Pembagian kerja ini menyebabkan adanya dua daerah yang saling bergantung, yaitu negara inti dan negara pinggiran. Secara geografi dan budaya kedua negara tersebut sama sekali berbeda, satu fokus pada padat modal dan satu lagi pada padat karya. Sementara itu, negara semi periferi bertindak sebagai zona penyangga antara inti dan pinggiran serta memiliki campuran jenis kegiatan yang ada di negara inti dan periferi.

Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. Immanuel Wallerstein memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Sehingga, integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan pasar (ekonomi) daripada kepentingan politik. Dimana ada dua atau lebih negara interdependensi yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan seperti *food, fuel, and protection*. Juga, terdapat satu atau dua persaingan politik untuk mendominasi yang dilakukan untuk menghindari hanya ada satu negara sentral yang muncul ke permukaan selamanya.

BAB 5

DUALISME EKONOMI, MASYARAKAT PLURALIS

A. DUALISME EKONOMI

Dualisme artinya bahwa dalam waktu yang sama di dalam masyarakat terdapat dua gaya sosial yang jelas berbeda satu sama lain, dan masing-masing berkembang secara penuh serta saling mempengaruhi. Teori dualisme pertama kalinya dikemukakan oleh seorang ekonom Belanda, J.H. Boeke. Teorinya berasal dari suatu fenomena di mana konsep ekonomi barat yang dibawa dan diterapkan oleh para penjajah ternyata tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat jajahannya dalam hal ini rakyat Indonesia, dalam artian mengalami kegagalan negara bekas jajahan sekarang bisa disebut negara sedang berkembang memiliki pola dan sistem sosial yang berbeda dengan negara barat. Pada awalnya pola dan sistem sosial barat memiliki daya penetrasi yang cukup kuat untuk masuk ke dalam sistem sosial negara jajahannya. Keduanya hidup berdampingan antara sistem sosial liberal barat dengan sistem sosial lokal negara jajahan (dalam hal ini Indonesia). Tetapi memang pada dasarnya adalah berbeda, tidak mungkin untuk disama-samakan. Penetrasi yang dilakukan ternyata tidak (bisa dibaca: kurang) bermakna dan menyokong satu dengan lainnya. Semuanya kelihatan semu, cantik di luar namun ada borok di dalamnya. Tidak menyembuhkan penyakit yang sesungguhnya. Sang superior dan inferior yang dimaksud dalam dualisme ekonomi Indonesia adalah industri dan pertanian. Industri diagung-agungkan oleh kebanyakan pihak, dipandang sebagai penggerak utama perekonomian bangsa, sementara

BAB 6

GLOBALISASI DAN STRATEGI INDUSTRIALISASI

A. GLOBALISASI

Menurut asal katanya, kata “GLOBALISASI” diambil dari kata global, yang maknanya adalah universal. Globalisasi merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik.

Ada pula yang mengatakan pengertian globalisasi sebagai berikut:

1. Hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi.
2. Suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.

Menurut Edison A. Jamli dkk (Kewarganegaraan.2005) Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Pengaruh dari globalisasi

Dampak positif globalisasi antara lain:

1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan
2. Mudah melakukan komunikasi
3. Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi)

BAB 7

DEMOKRATISASI DAN PERUBAHAN EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem perekonomian juga dapat diartikan sebagai cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (*planned economies*) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (*market economic*), elemen pasar yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Tidak ada satu negarapun yang bisa menerapkan suatu sistem perekonomian secara ekstrim. Di Indonesia, pemerintah mempunyai peran penting sebagai wasit dalam mengawasi jalannya perekonomian.

BAB 8

BIROKRASI, SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI

A. BIROKRASI

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara memiliki misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui media birokrasi karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi publik memberikan andil yang relatif besar. Semua yang terdapat dalam ruang lingkup penyelenggaraan negara tidak terlepas dari konteks *public services* dan *public affairs*. Barang dan jasa publik hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sedangkan konsekuensi pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab birokrasi. Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi publik adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini birokrasi diidentikkan dengan kinerja yang

BAB 9

MASYARAKAT SIPIL

A. MASYARAKAT SIPIL

Istilah “*civil society*” masih menjadi perdebatan baik secara terminologis maupun etimologis. Beberapa kalangan akademisi di Indonesia, menerjemahkan kata “*civil society*” sebagai “masyarakat madani” (Nurcholish Madjid, 1999; Dawam Rahardjo, 1999), “masyarakat warga” (Lembaga Etika Atmajaya, 1997), dan “masyarakat sipil” (Mansour Fakhri, 1996).

Harus diakui, konsep *civil society* dipahami dari perspektif yang berbeda-beda dan hal itu merupakan perkembangan yang dinamis sesuai dengan konteks, *setting*, ideologi dan kepentingan setiap subjek (INCIS, 2002). Dalam pendekatan Hegelian, penekanannya lebih pada pentingnya kelas menengah dan pemberdayaannya, khususnya pada sektor ekonomi, bagi pembangunan *civil society* yang kuat. Sementara itu dalam perspektif Gramscian penguatan *civil society* sebagai alat untuk menghadapi hegemoni ideologi negara. *Civil society* adalah sebuah arena tempat para intelektual organik dapat menjadi kuat yang tujuannya adalah mendukung upaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni negara. Dalam pendekatan Tocquevillian, penguatan *civil society* lebih menekankan pada penguatan organisasi-organisasi dan asosiasi independen dalam masyarakat dan melakukan inkubasi budaya keadaban (*civic culture*) untuk membangun jiwa demokrasi.

Terlepas dari beragamnya pendekatan dalam memahami *civil society*, sepertinya relevan untuk mengemukakan definisi *civil society* menurut Alfred Stepan (1988):

BAB 10

SEKTOR INFORMASI DAN USAHA MIKRO

A. SEKTOR INFORMAL

Sektor informal adalah merupakan unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal digambarkan suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara bagaimana dan dimana usaha tersebut dijalankan. Sektor informal juga didefinisikan sebagai sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah; sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari (Soetjipto, 1985 dalam Reni Pratiwi, 2012).

Saat ini, sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Dalam beberapa hal, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen operasional yang kaku. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal yang bersifat adaptif dan lentur, masih tetap bertahan bahkan mampu mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan dengan

BAB 11

EKSKLUSI SOSIAL

A. EKSKLUSI SOSIAL

Secara sederhana, eksklusi sosial mempunyai makna yang sama dengan kemiskinan pendapatan, merujuk pada pekerja yang tidak dibayar atau orang yang bekerja dengan pendapatan yang rendah. Namun secara luas, eksklusi sosial dapat diartikan sebagai proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat (Pierson, John. 2002. *Tackling Social Exclusion*. London and New York: Routledge.).

Setidaknya Ada lima kekuatan yang mendorong terjadinya proses eksklusi sosial yaitu:

1. Kemiskinan dan penghasilan rendah;
2. Tidak ada akses ke pasar kerja;
3. Lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jaringan sosial;
4. Efek dari kawasan dan lingkungan sekitar (*neighbourhood*);
5. Terputus dari layanan.

Kelima komponen tersebut diatas dapat mengeksklusi individu atau kelompok orang (Pierson, 2002).

BAB 12

MODEL PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada pertumbuhan (*growth*) yang dilaksanakan selama 32 tahun telah menimbulkan berbagai konsekuensi serius dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

Beberapa konsekuensi serius yang menimbulkan rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia, antara lain:

1. Utang pemerintah yang semakin menggunung, yaitu utang luar negeri sebesar 133 milyar dollar (sama dengan empat kali lipat lebih dari volume anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun, atau 100 persen lebih dari produk domestik bruto/PDB) dan utang dalam negeri sebesar 600 milyar dollar (Kompas, 11 April 2002).
2. Di kawasan Asia Tenggara, Pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia semakin rendah (3,0 persen), yaitu hanya menempati urutan kedua dari bawah atau setingkat di atas Thailand (Kompas, 11 April 2002).
3. Terjadinya struktur pasar distortif, seperti: pasar monopoli, oligopoli, kartel, ofensif, dan sebagainya (Damanhuri, 1996).
4. Semakin meningkatnya harga barang (tingkat inflasi yang tinggi).
5. Terjadinya ketidakseimbangan atau ketimpangan inter-regional, ketimpangan antar pedesaan, dan kawasan perkotaan, serta eksploitasi besar-besaran sumber daya alam di pedesaan sehingga menimbulkan dampak eksternalitas yang menciptakan biaya sosial yang tinggi.

PROFIL PENULIS

Amir Mahmud, S.Sos., S.H., M.Si.



Penulis lahir di Palembang 15 Mei Tahun 1970. Pendidikan terakhir S2 Magister Administrasi Publik Universitas Sjakhyakirti Tahun 2012. Saat ini Saat ini menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang. Penulis mengajar beberapa mata kuliah penting, antara lain Sosiologi Pembangunan, Teknik Pengambilan Keputusan.

Yuliana, S.Sos., M.Si.



Penulis lahir di Palembang Tahun 1972. Tahun 2012 menyelesaikan Pendidikan Strata Dua Magister Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Sjakhyakirti Palembang. Tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Perguruan Sjakhyakirti, saat ini menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Susi Lawati, S.E., M.Si.



Penulis lahir di Palembang 25 Juni 1985, Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prodi Ekonomi Pembangunan pada Tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan Strata Dua Magister Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Sjakhyakirti Palembang dan Lulus pada Tahun 2013, ditahun yang sama diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Perguruan Sjakhyakirti, dan saat ini menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Maryanto Tri Saputra, S.Kom., M.Si.



Penulis lahir di Bandar Lampung Tahun 1989. Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada STMIK Teknokrat Lampung Jurusan Sistem Informasi pada Tahun 2011 Pendidikan terakhir S2 Magister Administrasi Publik Universitas Sjakhyakirti Tahun 2021.

Saat ini menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Harry Sepga Nanda, S.E., M.Si.



Penulis lahir di Palembang, 03 September 1992. Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Universitas Sjakhyakirti Palembang Jurusan Ekonomi Manajemen pada Tahun 2015 Pendidikan terakhir S2 Magister Administrasi Publik Universitas Sjakhyakirti Tahun 2021.

Saat ini menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Dhiary Yessi Andarastuti, S.P., M.Si.



Penulis lahir di Teluk Betung Tahun 1975. Pendidikan terakhir S2 Magister Agribisnis Universitas Sriwijaya Tahun 2003. Pernah menjadi dosen tetap di Universitas Sjakhyakirti Palembang pada Tahun 2005 sampai dengan 2025. Saat ini menjadi dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas

IBA Palembang. Konsentrasinya adalah Ekonomi Mikro, Manajemen Pemasaran dan Tata Niaga Pertanian.

Buku Sosiologi Pembangunan membahas berbagai perspektif tentang pembangunan sosial dalam masyarakat, dengan menyoroti teori-teori utama yang mempengaruhinya. Dimulai dengan konsep dasar sosiologi pembangunan, buku ini menjelaskan bagaimana ilmu sosiologi dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang mendukung atau menghambat pembangunan. Perkembangan sosiologi pembangunan sejak tahun 1960-an dikaitkan dengan gagasan para pemikir klasik seperti Marx, Weber, dan Durkheim, serta bagaimana kegagalan program pembangunan di negara-negara berkembang mendorong lahirnya teori-teori baru dalam bidang ini.

Buku ini menguraikan dua teori besar dalam sosiologi pembangunan, yaitu teori modernisasi dan teori ketergantungan. Teori modernisasi berpendapat bahwa pembangunan mengikuti pola linear yang bisa direplikasi dari negara maju ke negara berkembang, dengan faktor seperti industrialisasi, urbanisasi, dan kapitalisme sebagai pendorong utama. Namun, teori ini mendapat kritik tajam karena dianggap mengabaikan faktor eksploitasi dan imperialisme dalam sejarah pembangunan global. Sebagai tanggapannya, teori ketergantungan muncul dengan menekankan bahwa keterbelakangan di negara dunia ketiga bukan akibat faktor internal semata, tetapi lebih karena ketergantungan ekonomi dan eksploitasi oleh negara maju.

Selain membahas teori-teori tersebut, buku ini juga mengulas teori sistem dunia yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein. Teori ini membagi negara-negara dalam sistem ekonomi global menjadi negara inti, semi-periferi, dan periferi, di mana negara berkembang sering kali terjebak dalam struktur ekonomi yang tidak menguntungkan. Dengan pendekatan yang kritis, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pembangunan dan tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang. Buku ini cocok bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang ingin memahami peran sosiologi dalam kajian pembangunan serta dampaknya terhadap masyarakat global.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

Sosial & Humaniora

ISBN 978-634-246-672-8



9

786342

466728